

Perubahan Politik di Indonesia Selama Masa Pendudukan Jepang

Masly Sihombing¹ Lady Yohana Sianturi² Niken Wanda Oktavia³

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}

Email: maslisihombing18@gmail.com¹ ladystr17@gmail.com² nikenwanda47@gmail.com³

Abstrak

Artikel ini membahas tentang perubahan politik di Indonesia selama pendudukan Jepang yaitu pada tahun (1942-1945) yang memiliki dampak besar pada kekuasaan dan kesadaran politik masyarakat. Jepang menggantikan kekuasaan Belanda dan menerapkan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan sumber daya dan dukungan rakyat Indonesia. Artikel ini akan menjelaskan langkah-langkah yang diambil Jepang seperti pembentukan organisasi lokal, pelatihan militer, dan penyebaran ide nasionalisme. Selain itu, fokus utama adalah bagaimana Jepang mendorong semangat kemerdekaan dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Melalui analisis ini, artikel ini bertujuan untuk menunjukkan betapa pentingnya masa pendudukan Jepang dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta pergeseran politik yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.

Kata Kunci: Perubahan Politik, Pendudukan Jepang, Indonesia, Nasionalisme, Kesadaran Politik, Organisasi Lokal, Pelatihan Militer, Sumber Daya, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan

Abstract

This article discusses the political changes in Indonesia during the Japanese occupation (1942-1945), which had a significant impact on power structures and political awareness among the people. Japan replaced Dutch colonial rule and implemented various policies to mobilize resources and garner support from the Indonesian population. The article will explain the steps taken by Japan, such as the establishment of local organizations, military training, and the promotion of nationalist ideas. Additionally, it will focus on how Japan fostered a spirit of independence and heightened political awareness among the society. Through this analysis, the article aims to illustrate the importance of the Japanese occupation in the history of Indonesia's struggle for independence, as well as the political shifts that occurred leading up to the proclamation of independence in 1945.

Keywords: Political Change, Japanese Occupation, Indonesia, Nationalism, Political Awareness, Local Organizations, Military Training, Resources, History of The Struggle for Independence



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebelum kedatangan Jepang di Indonesia, Belanda telah mengendalikan wilayah tersebut selama sekitar 350 tahun. Penguasaan yang berlangsung lama menyebabkan karakter masyarakat pada masa penjajahan Belanda terbentuk sesuai dengan kebijakan negara tersebut. Selama masa kolonialisme, Belanda menerapkan 4 kebijakan yang menyebabkan penderitaan bagi penduduk. Pertama, kebijakan ekonomi VOC yang mengharuskan orang Indonesia membayar pajak atas hasil bumi kepada Belanda. Kedua, Sistem *verplichte leverantie* mengharuskan masyarakat untuk menjual hasil panen mereka kepada Belanda dengan harga yang sangat rendah. Kebijakan ketiga, *preangerstelsel*, yang mewajibkan warga priangan untuk menanam kopi. Pekerja rodi menyebabkan rakyat Indonesia bekerja tanpa upah, yang mengakibatkan banyak kematian akibat kelaparan. Sejak itu, penderitaan rakyat Indonesia dimulai, ditandai dengan kemiskinan, kelaparan, penyebaran penyakit, kematian yang meningkat akibat kelaparan dan kekejaman penjajah, serta keterbelakangan dan ketidaktahuan yang meluas di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1755, VOC berhasil menguasai pulau Jawa secara politik melalui perjanjian Giyanti, sehingga raja kehilangan kekuasaan politiknya. Campur tangan pemerintah kolonial terhadap urusan istana juga membuat peran ulama sebagai penasihat istana semakin terpinggirkan. Eksploitasi tanah dan sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial menyebabkan penderitaan pada rakyat, menimbulkan rasa takut, dan menimbulkan kebutuhan akan pemimpin informal (ulama) ketika peran raja tidak dianggap mampu lagi memberikan perlindungan dan keamanan. Transisi dari masa kekuasaan kolonial Belanda ke masa pendudukan Jepang menunjukkan fase yang suram dalam sejarah Indonesia. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia tidak berhenti, baik di bawah pemerintahan Belanda maupun Jepang. Meskipun ada perbedaan dalam cara kedua kekuatan tersebut memperlakukan Indonesia, keduanya meninggalkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Jepang dengan lancar menguasai Indonesia dari Belanda, merebut lokasi strategis seperti Tarakan pada 12 Januari 1942. Perlawanan Belanda terhadap invasi Jepang berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Kalijati pada 9 Maret 1942, yang menandai dimulainya masa pendudukan Jepang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur sebagai metode utama. Sumber-sumber yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen sejarah, akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perubahan politik yang terjadi selama masa pendudukan Jepang. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber akan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan ini akan membantu mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola perubahan politik, dan pengaruh kebijakan Jepang terhadap masyarakat Indonesia. Menggunakan pendekatan studi kasus untuk meneliti organisasi-organisasi lokal yang dibentuk selama masa pendudukan Jepang dan bagaimana organisasi tersebut berkontribusi pada perubahan kesadaran politik dan nasionalisme di Indonesia. Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah mensintesis temuan-temuan tersebut dan memberikan interpretasi yang jelas mengenai dampak perubahan politik selama masa pendudukan Jepang. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan artikel yang disusun dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai perubahan politik di Indonesia selama masa pendudukan Jepang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan menguasai Hindia Belanda pada tahun 1942, mereka menduduki Indonesia. Jepang mengklaim bahwa mereka datang sebagai pembebas Asia dari penjajahan Barat, tetapi sebenarnya mereka menciptakan blok ekonomi dan politik di Asia dan Pasifik yang dipimpin oleh Jepang. Mereka melakukan banyak kebijakan yang menindas dan mengeksploitasi orang Indonesia. Jepang mengambil sumber daya alam Indonesia, melarang penggunaan bahasa Belanda dan bahasa daerah, melakukan propaganda dan indoktrinasi melalui media dan institusi pendidikan, dan menerapkan sistem kerja paksa, atau romusha. Masuknya Jepang ke Indonesia dimulai pada 8 Desember 1941, ketika pasukan Sakura State menyerang Pearl Harbour, pangkalan terbesar angkatan laut AS di Samudra Pasifik. Serangan itu mengakibatkan Jepang menghancurkan basis militer Amerika di wilayah tersebut, termasuk di Filipina. Setelah itu, Jepang memperluas basis militernya ke Indonesia, di selatan. Jepang pergi ke Indonesia untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Mereka mengira sumber daya alam Indonesia cukup. Alasan lain dari pendudukan Jepang adalah Jepang juga mengambil alih Indonesia karena masalah ekonomi. Dengan berkembangnya industri, Jepang perlu menguasai

sumber daya alam Indonesia, terutama minyak tanah, timah, karet, dan lainnya. Krisis ekonomi global terjadi antara tahun 1929 dan 1930. Setelah beberapa tahun, Jepang tampaknya tidak mengalami banyak kesulitan; negara-negara Eropa bersaing untuk mengambil pasaran ekonominya dengan menggunakan politik dumping, yaitu menjual barang-barang di luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada di Jepang. Pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan agar penjualan tidak mengalami kerugian.

Situasi global dan regional yang mempengaruhi keputusan Jepang

Pada awal tahun 1940-an, dunia sedang mengalami kekacauan karena Perang Dunia II, yang sangat mempengaruhi keputusan Jepang untuk memperluas wilayahnya ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Beberapa faktor yang berperan penting dalam keputusan Jepang adalah:

1. Perang Dunia II dan keinginan untuk menguasai. Perang Dunia II yang dimulai pada tahun 1939 menciptakan ketidakstabilan di seluruh dunia. Jepang ingin menjadi kekuatan utama di Asia dan melihat Indonesia sebagai tempat yang strategis karena kaya akan sumber daya alam. Dalam situasi ini, Jepang sangat membutuhkan sumber daya untuk mendukung upaya perang mereka. Menurut M. C. Ricklefs dalam bukunya *Sejarah Indonesia Modern*, Jepang merasa perlu menguasai Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mereka.
2. Ketidakpuasan terhadap penjajahan barat. Rakyat Indonesia sudah merasa tidak puas dengan penjajahan Belanda yang berlangsung lama. Jepang memanfaatkan momen ini untuk mengklaim diri sebagai "pembebas" rakyat Indonesia. Dalam sebuah artikel di *Jurnal Sejarah*, disebutkan bahwa Jepang menggunakan propaganda untuk menarik perhatian rakyat Indonesia dengan janji memberikan kemerdekaan dan hak-hak yang lebih baik daripada yang diberikan Belanda.
3. Strategi geopolitik dan keamanan wilayah. Jepang juga harus menghadapi ancaman dari sekutu yang ingin mengembalikan kekuasaan atas wilayah yang diduduki. Dalam artikel di *Website Pusat Penelitian Sejarah*, dijelaskan bahwa Jepang memanfaatkan ketidakpastian ini untuk memperkuat keberadaan militernya di Asia Tenggara, melindungi jalur suplai, dan menjaga posisinya di kawasan tersebut. Keputusan Jepang untuk menduduki Indonesia selama Perang Dunia II dipengaruhi oleh berbagai kondisi global dan regional yang rumit. Kebutuhan akan sumber daya, strategi keamanan, dan dampak dari penjajahan Barat semuanya berperan dalam kebijakan Jepang di Indonesia. Memahami konteks ini penting untuk menganalisis perubahan politik yang terjadi selama masa pendudukan dan dampaknya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Reorganisasi pemerintahan kolonial

Setelah Jepang mengalahkan Belanda pada tahun 1942, pemerintah Belanda di Indonesia dibubarkan. Jepang mengambil alih kekuasaan dan menghentikan sistem pemerintahan kolonial yang telah ada selama lebih dari tiga ratus tahun. Jepang berusaha menggantikan ideologi kolonial dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka mengklaim bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan Belanda, tetapi kenyataannya, Jepang menerapkan kontrol yang sangat ketat terhadap masyarakat (Ricklefs, M. C. (2008)). Setelah menguasai Indonesia, Jepang segera membentuk militer lokal untuk memperkuat pengendalian mereka. Salah satu organisasi yang dibentuk adalah PETA (Pembela Tanah Air), yang terdiri dari pemuda Indonesia yang dilatih untuk menjadi tentara. Koesoemadinata (1995), menjelaskan bahwa tujuan utama pelatihan ini adalah untuk memastikan bahwa pemuda Indonesia setia kepada Jepang dan siap mendukung kepentingan Jepang dalam perang.

Jepang mengganti sistem pemerintahan yang ada dengan struktur baru yang lebih sesuai dengan tujuan mereka. Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah, yang masing-masing dipimpin oleh seorang daid (kepala daerah) yang ditunjuk oleh Jepang. Dardjowidjojo (1999), menyatakan bahwa Jepang juga membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang disebut tonarigumi untuk membantu mengawasi dan melaksanakan kebijakan Jepang di tingkat lokal. Ini menunjukkan bahwa Jepang berusaha mengatur masyarakat Indonesia dengan cara yang lebih terstruktur. Selama pendudukan, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk mendukung perang mereka. Mereka mengambil sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan mereka dan menerapkan sistem kerja paksa. A. H. Nasution (2012) menekankan bahwa meskipun Jepang menjanjikan perbaikan dalam beberapa aspek kehidupan, banyak rakyat Indonesia yang menderita akibat kebijakan yang keras ini. Rakyat menderita meskipun Jepang datang dengan alasan untuk membebaskan mereka. Reorganisasi pemerintahan kolonial di Indonesia selama masa pendudukan Jepang membawa banyak perubahan. Dari pembubaran pemerintah Belanda hingga pembentukan struktur administrasi baru, semua ini menunjukkan usaha Jepang untuk menguatkan kekuasaan mereka. Meskipun mereka mengklaim sebagai pembebas, banyak kebijakan yang diterapkan justru menyusahkan rakyat Indonesia dan mengakibatkan penderitaan yang besar.

Perubahan dalam sistem politik dan sosial

Perubahan dalam sistem politik dan sosial di Indonesia selama pendudukan Jepang menunjukkan bagaimana Jepang berusaha mengendalikan dan membatasi aktivitas politik. Meskipun mereka mengklaim datang sebagai pembebas, sistem pemerintahan yang diterapkan cenderung menindas. Setelah Jepang menduduki Indonesia, mereka segera mengganti sistem pemerintahan yang ada dengan sistem baru yang lebih terpusat. Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa daerah yang dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk oleh mereka. Menurut L. M. H. Liem (2001), Jepang menerapkan pemerintahan secara otoriter, di mana semua keputusan penting dibuat oleh pemerintah pusat di Tokyo, sedangkan pejabat lokal hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan. Tujuannya adalah untuk memperkuat kontrol atas Indonesia dan memastikan rakyat patuh. Pengaruh kebijakan yang diterapkan Jepang sangat berpengaruh terhadap struktur politik di Indonesia. Mereka membentuk berbagai organisasi untuk mendukung kontrol politik, seperti Keimin Bunka Sha dan PETA. Menurut Poesponegoro dan Notosusanto (1996), Jepang berusaha memanfaatkan semangat nasionalisme yang ada dengan memberikan sedikit kebebasan kepada organisasi-organisasi tersebut, namun sebenarnya tujuan mereka hanya untuk kepentingan Jepang. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan pemimpin nasionalis yang berharap lebih dari sekadar kebebasan yang bersifat simbolis.

Pengaturan dan Pembatasan Aktivitas Politik di Indonesia

Jepang juga memberlakukan berbagai pembatasan terhadap aktivitas politik di Indonesia. Mereka menutup organisasi yang dianggap mengancam kepentingan mereka dan hanya memperbolehkan kelompok yang mendukung Jepang untuk beroperasi. (Marwati Djoened Poesponegoro, 2003) menjelaskan bahwa langkah-langkah ini memaksa banyak pemimpin politik untuk bersembunyi atau bekerja sama dengan Jepang agar tetap bisa berfungsi. Pembatasan ini menimbulkan ketegangan yang berkontribusi pada meningkatnya semangat perjuangan kemerdekaan setelah Jepang mulai melemah.

Kebijakan Perencanaan Bahasa Jepang

Pada masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, Jepang menerapkan kebijakan perencanaan bahasa di Indonesia. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan

memperluas penggunaan bahasa Indonesia dan Jepang di Indonesia. Upaya Jepang untuk membuat politik berjalan lancar bukanlah hal yang main-main. Jepang mengumumkan secara bertahap persyaratan penggunaan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia untuk merek, nama toko, surat, dan lainnya. Langkah ini diambil oleh Jepang untuk mencegah penduduk melewati detail penting dalam implementasi peraturan ini. Prosedur Language Planning yang dilakukan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mirip dengan yang dilakukan oleh Ivar Aasen.

Alasan Jepang menerapkan kebijakan Language Planning adalah untuk memudahkan pemahaman informasi dalam bahasa Indonesia. Jika Jepang tidak tegas memerintahkan penggunaan bahasa Indonesia, komunikasi dengan masyarakat Indonesia akan sulit karena beragamnya bahasa daerah dan logat di Indonesia. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda untuk menghapus pengaruh Belanda di Indonesia. Pelarangan penggunaan bahasa Belanda dan keharusan menggunakan bahasa Indonesia tidak hanya terbatas pada bahasa lisan, tetapi juga berlaku untuk bahasa tertulis. Berbagai peraturan yang melarang penggunaan bahasa Belanda diterbitkan Jepang di majalah dan surat kabar. Salah satu aturan tersebut ditulis di majalah Kanpo pada tahun 1943. Penggunaan bahasa Indonesia juga diterapkan pada semua pertemuan penting antara perwakilan gerakan dan pejabat senior militer Jepang. Dalam persidangan Chuo Sangi-In, petinggi Jepang menyampaikan pernyataan mereka dalam bahasa Jepang yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia.

Demikian pula, para tokoh Indonesia menyampaikan perkataan mereka dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. 14 Balatentara Jepang tidak memaksa tokoh-tokoh Indonesia untuk menggunakan bahasa Jepang. Mereka menyadari bahwa tidak banyak orang Indonesia yang bisa berbahasa Jepang dan meminta agar bahasa Indonesia digunakan. Pada prosedur "Pengembangan", Komisi Bahasa Indonesia melakukan pengembangan peristilahan dalam bahasa Indonesia. Tindakan ini termasuk dalam teknik propaganda "Mengatur Keadaan", meskipun dilakukan oleh Komisi Bahasa Indonesia karena Jepang yang mengendalikan lembaga tersebut. Dalam prosedur "Penyebaran", Jepang mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Tindakan ini termasuk dalam teknik propaganda "Mengatur Keadaan", karena Jepang berusaha mengatur penggunaan bahasa di Indonesia sehingga bahasa Belanda segera hilang kedudukannya. Melalui prosedur-prosedur tersebut dapat diketahui bahwa politik bahasa yang dijalankan oleh Jepang merupakan bagian dari propaganda Jepang secara tidak langsung. Politik bahasa ini memungkinkan Jepang untuk mengendalikan bangsa Indonesia dengan mudah dan menyembunyikan tujuan propaganda Jepang yang sebenarnya.

Pengaruh pendudukan Jepang terhadap kemerdekaan

1. Mendorong nasionalisme: Pendudukan Jepang memicu kesadaran rakyat Indonesia tentang pentingnya persatuan. Meskipun bertindak sebagai penjajah, Jepang memberikan peluang bagi pemuda dan tokoh nasionalis untuk berorganisasi. Pembentukan organisasi seperti Jepang Dai Nippon membuka jalan bagi munculnya nasionalisme yang lebih terstruktur, sehingga memperkuat identitas nasional di masyarakat.
2. Pendidikan dan mobilisasi: Jepang mengubah sistem pendidikan dan memberikan pelatihan militer kepada masyarakat. Meskipun sekolah-sekolah dijalankan dengan kurikulum yang mendukung propaganda Jepang, ini memberikan kesempatan bagi pemuda untuk belajar dan berorganisasi. Pelatihan militer yang diselenggarakan Jepang juga mengasah keterampilan yang berguna dalam perlawanan selanjutnya, serta membentuk pemimpin baru di kalangan pemuda.
3. Perubahan strategi pergerakan: Sebelum pendudukan Jepang, gerakan kemerdekaan lebih bersifat elit dan terpisah. Namun, selama masa pendudukan, banyak organisasi mulai

bersatu. Tokoh-tokoh seperti Sukarno dan Mohammad Hatta, yang sebelumnya aktif dalam organisasi berbeda, kini berkolaborasi untuk menghadapi penjajahan Jepang dan mempersiapkan kemerdekaan pasca perang.

4. Dampak ekonomi dan sosial: Jepang mengubah struktur ekonomi dengan memaksa masyarakat bekerja di sektor-sektor yang mendukung upaya perang. Walaupun hal ini mengakibatkan penderitaan, kondisi tersebut meningkatkan kesadaran kolektif tentang eksploitasi dan ketidakadilan, yang kemudian memperkuat gerakan kemerdekaan. Para pejuang kemerdekaan menyadari bahwa perjuangan harus dilakukan secara bersama-sama untuk melawan penindasan.
5. Situasi pasca perang dunia II: Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, kekosongan kekuasaan memberikan kesempatan bagi pemimpin nasionalis untuk segera memproklamkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pengalaman selama pendudukan dan pelatihan yang diterima pemuda menjadi dasar bagi persatuan dan ketahanan dalam menghadapi kolonialisme Belanda yang kembali ingin menguasai Indonesia.

Meskipun bersifat kolonial dan menindas, pendudukan Jepang mengubah dinamika pergerakan kemerdekaan Indonesia. Melalui mobilisasi masyarakat, pendidikan, dan pembentukan identitas nasional, Jepang tanpa sadar mempercepat proses menuju kemerdekaan. Perubahan dalam strategi dan tujuan pergerakan yang lebih terkoordinasi dan terfokus terjadi sebagai respons terhadap situasi tersebut, berkontribusi pada proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

KESIMPULAN

Selama pendudukan Jepang (1942-1945), terjadi sejumlah perubahan politik signifikan di Indonesia. Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda dan menerapkan kontrol langsung, berusaha meraih dukungan rakyat melalui propaganda. Dalam proses ini, Jepang mendirikan organisasi-organisasi baru seperti Peta (Pembela Tanah Air) dan Jepang Dai Nippon, yang memberikan kesempatan bagi pemuda untuk berlatih dan berorganisasi meskipun dalam konteks yang didominasi oleh Jepang. Selain itu, masyarakat dipaksa terlibat dalam upaya perang melalui kerja paksa, yang mengubah struktur sosial yang ada. Sistem pendidikan juga mengalami transformasi untuk mendukung ideologi Jepang, namun tetap memberikan peluang bagi pemuda untuk mendapatkan pendidikan yang sebelumnya sulit diakses. Dampak dari perubahan ini menciptakan peningkatan kesadaran politik di kalangan rakyat, di mana banyak tokoh nasionalis mulai merumuskan cita-cita kemerdekaan dan mengadakan pertemuan untuk menyusun strategi perjuangan. Evaluasi terhadap dampak perubahan politik ini menunjukkan penguatan semangat nasionalisme di kalangan rakyat. Meskipun Jepang adalah penjajah, tindakan mereka meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dalam meraih kemerdekaan. Organisasi dan pelatihan yang diberikan Jepang menjadi dasar bagi pemimpin muda untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Ketika Jepang menyerah pada 1945, kekosongan kekuasaan dimanfaatkan oleh pemimpin nasionalis untuk memproklamkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Selain itu, pendudukan Jepang mengubah karakter pergerakan kemerdekaan dari yang elit menjadi lebih inklusif, dengan banyak kelompok sebelumnya terpisah mulai bersatu dalam menghadapi penjajahan. Namun, masa pendudukan ini juga meninggalkan warisan konflik dan ketegangan sosial yang mendalam, akibat penderitaan yang dialami masyarakat, memengaruhi hubungan sosial di Indonesia pasca kemerdekaan. Dengan demikian, perubahan politik selama pendudukan Jepang memiliki peranan penting dalam membentuk arah perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, di mana tindakan Jepang, meskipun menindas, mendorong rakyat untuk bersatu dan kemerdekaan akhirnya tercapai pada tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Dardjowidjojo, S. (1999). "Administrasi Jepang di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 20-30.
- Gaol, D. L., & Seprina, R. (2023). Ketatanegaraan Indonesia di Bawah Masa Pendudukan Jepang (1942-1945). *KRINOK : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 3(1), 186-202.
- Handayani, S. (2019). "Eksplorasi Ekonomi dan Mobilisasi Sosial Selama Pendudukan Jepang di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 10(3), 120-135.
- Jurnal Sejarah. (2012). "Peran Jepang dalam Membangun Kesadaran Nasional di Indonesia." Diakses dari [jurnal.sejarahindonesia.org](<http://jurnal.sejarahindonesia.org>).
- Koesoemadinata, S. (1995). "Peta Sejarah Indonesia." *Jurnal Sejarah*, 1(1), 1-15.
- Liem, L. M. H. (2001). *Sejarah Pendudukan Jepang di Indonesia*. Penerbit Andi.
- Moedjanto, Indonesia abad Ke-20 1: Dari Kebangkitan nasional Sampai Lingkarjati, 66
- Murtadha, M. (2018). "Pengaruh Pendidikan Jepang terhadap Kesadaran Nasionalisme Pemuda Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 23(2), 87-100.
- Nasution, A. H. (2012). *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Penerbit LIPI.
- Permadi, G. E & Purwaningsih, M.S (2015). Politik Bahasa Pada Masa Pendudukan Jepang. *AVATARA : Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(3), 590-603
- Poesponegoro, M. D. (2003). *Sejarah Indonesia Modern*. Penerbit Kompas.
- Poesponegoro, M. dan Notosusanto, S. (1996). *Sejarah Nasional Indonesia Volume V*. Penerbit Balai Pustaka.
- Pusat Penelitian Sejarah. (2020). "Strategi Jepang di Asia Tenggara selama Perang Dunia II." Diakses dari [sejarah.kemdikbud.go.id](<http://sejarah.kemdikbud.go.id>).
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern*. Penerbit Serambi.
- Sumaryono, R. (2020). "Sukarno dan Hatta: Dari Penjajahan Jepang Menuju Proklamasi Kemerdekaan." *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 15(1), 45-60.
- Wahyudi, A. (2021). "Dampak Pendudukan Jepang Terhadap Kemerdekaan Indonesia." *Jurnal Sejarah Indonesia*, 18(4), 205-220.